

ABSTRAK

Purwanto. MH. 17302197, IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2/2003 DAN PERKAP NO. 14/2011 TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK DI POLRES PURWOREJO, 2018, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ikslam Sultan Agung Semarang.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan KEPP di Polres Purworejo, kendala yang ditemukan dan solusi tumpah tindihnya kedua aturan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudridis empiris. Metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian (1) Pelaksanaan kode etik Polri diawasi oleh Unit Propam yang merupakan unsur pengawasan yang berada dibawah Kapolres. Unit ini bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. pelanggaran kode etik oleh anggota Polres masih termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Pelanggaran yang terjadi pada anggota Polri di Polres Purworejo masih termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan; (2) Beberapa kendala yang sering terjadi dalam penegakan kode etik yaitu seperti ketidakhadiran terduga, lama persidangan di pengadilan umum, tidak adanya bidang pertanggung jawaban profesi di Polres, tidak adanya saksi, dan kekurangsadaran anggota Polri; dan (3) 3. Solusi tumpah tindihnya penerapan PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 adalah dengan (1) penerapan hukum yang tegas dan konsisten, (2) penyempurnaan sistematis hukum

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan, Kode Etik

ABSTRACT

Purwanto. Mh. 17302197, IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 2/2003 AND PERKAP NO. 14/2011 ON THE ENFORCEMENT OF THE ETHICS CODE IN PURWOREJO POLRES, 2018, Master of Law Program in Islamic University Sultan Agung Semarang.

Professional code of ethics is an action, guide or moral or moral morality to be used for someone who can be formed by members of the profession itself and bind it in practice. Thus the professional code of ethics contains ethical values which are referred to as answers to supervisors and controlling how or also are called administrators or acting in carrying out their profession.

This research is intended to describe and analyze Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Police Member Disciplinary Regulations and National Police Regulation Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Republic of Indonesia National Police in enforcing KEPP at Purworejo Regional Police, which was established and the two overlapping solutions were overlapped.

The approaching method in this study is the judicial empiric approach. Methods of data collection, interviews, documentation, and literature studies. As well as data analysis methods that are qualitative data analysis.

Based on the results of the research (1) Running a code of ethics supervised by the Propam Unit which is an element of supervision under the Police Chief. This unit is used to guide discipline, maintain order, including internal safeguards, in order to uphold professional discipline and code of ethics and service to related people. violations of the code of ethics by police officers are still categorized as minor violations. the violations that occurred to members of the National Police in Purworejo District Police were still categorized as minor violations; (2) Some things that often occur in the enforcement of a code of ethics, such as unexpected absences, length of trial in the general court, no problems, and no more problems at the police station; and (3) 3. Solution to overlapping the application of Government Regulation No. 2 of 2003 and National Police Regulation No. 14 of 2011 is by (1) the application of honest and consistent law, (2) improving the legal systematics

Keywords: Implementation, Enforcement, Code of Ethics